

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berbicara masalah negara tirai bambu ini tidak akan ada habisnya, karena Negara ini merupakan salah satu Negara yang mempunyai masalah terbanyak. Masalah-masalah di Negara dengan penduduk terbanyak ini mulai dari konflik antar etnis, pelanggaran HAM di Tibet dan praktisi Falun Gong, masalah pencemaran lingkungan, dan beberapa masalah domestic dan internasionalnya. Akan tetapi, berbeda dengan masalah ekonominya. Cina merupakan Negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Cina yang berkembang dengan sangat cepat ini berawal dari reformasi ekonomi Deng Xiaoping yaitu dengan merubah arah kebijakan Cina khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Didukung oleh penduduknya, Cina terus mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi. Untuk terus dapat meningkatkan ekspornya, Cina harus melakukan kerjasama perdagangan dengan Negara-negara lain. Cina yang semula tertutup terhadap Barat menjadi terbuka setelah kebijakan ekonomi Deng Xiaoping. Oleh karena itu Cina dapat melakukan ekspansi pasarnya ke Negara Barat. Akan tetapi, Cina masih belum bebas melebarkan sayapnya karena terhambat oleh beberapa faktor yang dikarenakan aturan-aturan dalam WTO yang merupakan organisasi yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Merasa mampu bersaing dalam pasar internasional, Cina berkeinginan bergabung dalam keanggotaan WTO.

Melihat masalah yang dihadapi Cina itulah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Kepentingan Cina dalam WTO**

(studi kasus : **Penerimaan Standar Lingkungan dalam Kebijakan Ekonomi Cina**)”.

#### **A. Tujuan penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

*Pertama*, memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi Cina setelah reformasi ekonominya.

*Kedua*, memberikan gambaran tentang pengaruh perkembangan ekonomi Cina terhadap lingkungan.

*Ketiga*, menjelaskan latar belakang Cina bergabung dalam keanggotaan WTO dengan kesediaannya menerima penetapan standar lingkungan kedalam kebijakan ekonomi Cina.

#### **B. Latar belakang masalah**

Negara dengan jumlah penduduk satu milyar lebih ini merupakan Negara dengan penduduk terbesar di dunia. Penduduk Cina terdiri dari berbagai etnis diantaranya, etnis Han, Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibtan, Miao, Manchu, Mongol, Buyi, Korean, dan etnis-etnis lain yang merupakan etnis campuran. Negara dengan berbagai etnis ini juga memiliki kebudayaan yang merupakan salah satu kebudayaan tertua di dunia.

Cina tidak hanya terkenal dengan kebudayaannya yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, tapi Cina juga merupakan Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Perkembangan ekonomi Cina diawali

dengan reformasi ekonomi Deng Xiaoping dengan merubah arah kebijakan Cina khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Kebijakan yang sebelumnya oleh Mao Ze Dong lebih mengedepankan stabilitas politik dibandingkan dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi mengakibatkan kemunduran pembangunan Cina. Berbeda dengan dengan kebijakan Mao Ze Dong, kebijakan Deng Xiaoping membawa perubahan pada Cina yaitu dengan lebih menekankan pada sektor ekonomi yang jug berdampak baik pada perubahan politik di Cina.

Munculnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina memberikan perubahan yang signifikan dalam perkembangan ekonomi dan politik Cina. Perubahan tersebut disebabkan oleh perbedaan arah kebijakan Mao Ze Dong dengan Deng Xiaoping yang sangat menonjol dalam bidang ekonomi dimana di masa Deng Xiaoping para pemimpin tidak boleh lagi terlalu berkuat pada ideology komunis, melainkan ekonomi. Kebijakan dari pemimpin Cina ini mengantarkan Cina pada gerbang kesuksesan.

Munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia akibat dari kesuksesannya adalah kenyataan mutakhir yang tidak bisa dipungkiri oleh Negara manapun. Sejak tahun 1978, Cina menjadi sebuah Negara dengan dua sistem yaitu; secara politik tetap komunis dan secara ekonomi menjadi kapitalis atau sistem sosialisme pasar.<sup>1</sup> Sejak itulah Cina menjadi lebih terbuka terhadap Barat dan dunia internasional. Keterbukaan Cina terhadap barat merupakan salah satu penyebab meningkatnya ekspor Cina dimana pada tahun 1996 negara tirai bambu ini masuk pada peringkat sepuluh besar Negara pengekspor terbesar di dunia dan

---

<sup>1</sup> Taufik Adi Susilo. China Connection. Yogyakarta : Garasi. 2008.Hal.24

peringkat ke empat pada tahun 2003. Selain meningkatnya nilai ekspor, penanaman modal asing di Cina juga merupakan akibat dari keterbukaannya tersebut. Pesatnya arus masuk modal asing terlihat pada surplus neraca pembayaran (balance of payment/BOP) naik 55 persen menjadi 120 miliar dollar AS tahun 2003.<sup>2</sup>

Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh meningkatnya perindustrian itu tidak selalu berdampak positif. Lingkungan di Cina yang terabaikan menyebabkan degradasi lingkungan. Kekayaan alam di Negara itu secara kontinuitas mengalami eksploitasi besar-besaran tanpa menghiraukan akibat dari eksploitasi tersebut. Contoh nyata dari eksploitasi di Cina misalnya, Cina yang semula menjadi pengeksport batu bara terbesar di dunia kini menjadi Negara pengimpor batu bara terbesar. Hal tersebut dikarenakan Cina menguras habis kekayaan alamnya itu untuk industry dalam negerinya dan untuk mendapatkan keuntungan besar dari ekspor.

Semakin lama semakin jelas bahwa pertumbuhan ekonomi negara itu sama kuatnya dengan pencemaran lingkungan. Pemerintah Beijing memang menandatangani protokol Kyoto, tetapi kesepakatan ini tidak mendesak Cina untuk berusaha lebih kuat mencari jalan keluar bagi masalah lingkungan hidup. Sebagai negara "berkembang" Cina tidak diwajibkan untuk mengurangi limbah gas CO<sub>2</sub>. Banyak pabrik Cina memboros-boroskan energi atau bahan baku dalam skala besar atau kecil, yang semakin lama semakin menambah bau seperti di wilayah Ruhr Jerman dahulu. Udara di sekitarnya berwarna abu-abu, karena

---

<sup>2</sup> <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0407/19/internasional/1152662.htm>/ Jumat, 27 Februari 2004. Diakses tanggal 12 April 2009.

penuh limbah yang dihasilkan berbagai cerobong asap pabrik-pabrik semen, kertas dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Di bawah jembatan, sungai-sungai terlihat kering. Cara produksi Cina yang tradisional malah lebih banyak menghabiskan bahan baku dan energi dibandingkan cara produksi di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa dan Jepang. Cina adalah Negara pencemar no dua di dunia setelah Amerika Serikat. Sekitar 30% wilayah daratan Cina tercemar hujan asam. 300 juta warga Cina tidak punya sarana air minum bersih, lima dari tujuh sungai terbesar di Cina sangat tercemar dan kotor, halnya 90% air tanah di kota-kota di Cina. Kualitas udara juga bermasalah sama. Cina adalah negara kedua terbesar di dunia penghasil limbah gas rumah kaca, setelah Amerika Serikat. Dua pertiga kota-kota Cina harus menghadapi pencemaran udara dan 16 dari 20 kota terkotor di dunia ada di Cina.<sup>3</sup>

WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia didirikan tanggal 1 Januari 1995. Organisasi ini memberikan banyak persyaratan untuk calon anggota yang ingin bergabung dalam keanggotaannya. Salah satu syarat yang ada di dalamnya yaitu penerapan standar lingkungan. Melihat salah satu persyaratannya, maka ada ketidakmungkinan untuk Cina bergabung dalam organisasi yang mengatur masalah perdagangan antar Negara tersebut mengingat masih buruknya keadaan lingkungan di Cina. Tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi membutuhkan usaha yang sangat besar dalam pembenahannya. Perbaikan lingkungan di Cina membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang lama. Ketika Cina ingin menjadi bagian dari WTO, maka perbaikan lingkungan harus dilakukan oleh Cina.

---

<sup>3</sup> [http://www.ranesi.nl/ekonomi/cina\\_korbakan\\_lingkungan\\_hidup/htm](http://www.ranesi.nl/ekonomi/cina_korbakan_lingkungan_hidup/htm). diakses tanggal 28 Februari 2009.

Sedangkan perbaikan lingkungan tersebut akan menghabiskan dana yang besar yang nantinya akan berpengaruh pada kenaikan biaya produksi, salah satunya mengganti alat-alat produksi yang ramah lingkungan. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan menurunnya pendapatan di Cina.

Kenyataan Cina mengalami peningkatan ekonomi terlihat pada tahun 1990-an sebelum Cina masuk menjadi anggota WTO. Cina memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, dan mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi diregangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi hampir 1,25 miliar orang dan PDB hanya \$3.800 per kapita, Cina menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Cina adalah \$1.300. Perkembangan ekonomi Cina diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Cina.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, jumlah Negara anggota WTO kini mencapai 148 negara, salah satunya adalah Cina yang bergabung menjadi anggota WTO sejak tahun 1999 dan baru menjadi anggota resmi pada tahun 2002.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://perpustakaan-online.blogspot.com/2008/04/ekonomi-china.html>

<sup>5</sup> [http://theglobalgenerations.blogspot.com/2008/07/di-balik-bergabungnya-china-ke-dalam\\_07.html](http://theglobalgenerations.blogspot.com/2008/07/di-balik-bergabungnya-china-ke-dalam_07.html). diakses tanggal 23 agustus 2009.

### **C. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik saut pokok permasalahan yaitu **“Mengapa Cina menerima penerapan standar lingkungan kedalam kebijakan ekonominya sebagai syarat keanggotaan WTO?”**

### **D. Kerangka Dasar Teori**

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menggunakan teori pembuatan keputusan (*Decision Making Theory*) dan Teori Persepsi guna menjelaskan permasalahan yang ada.

#### **1. Decision Making Theory**

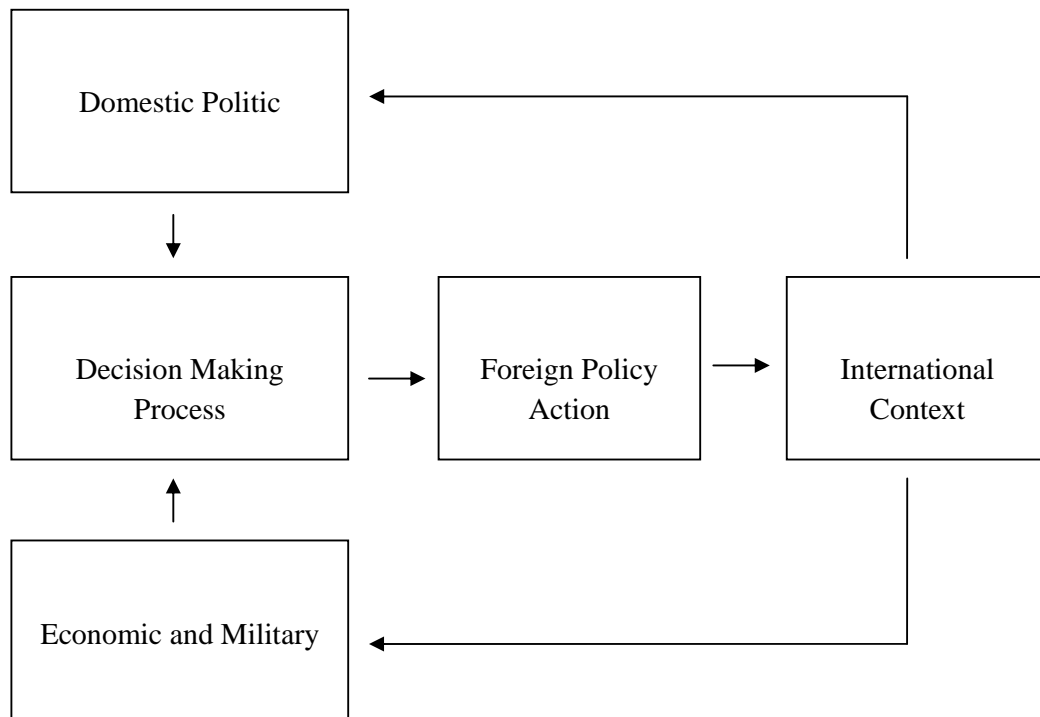
*Decision Making theory* merupakan tindakan memilih alternative tersedia dimana terdapat adanya suatu ketidakpastian, berarti memilih alternative yg jelas harus alternatif yg terbaik (*the best alternative*). Inti dari pengambilan keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat, setelah suatu evaluasi/penilaian mengenai efektifitasnya dalam mencapai tujuan yg dikehendaki pengambil keputusan (decision maker).

Teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan hanya pada Negara sebagai abstraksi metafisik atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut “Eksekutif”, melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia, khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud

maupun tujuannya adalah tindakan Negara. Tindakan Negara tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama Negara.<sup>6</sup>

Menurut William D. Coplin, Decision making process digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. skema pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>7</sup>



Dari skema di atas, ada 3 hal yang mempengaruhi decision makers dalam menentukan kebijakan luar negerinya:

<sup>6</sup> James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraf, Jr. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Study. Terjemahan Amien Rais, Harwnto Dahlan, dan Tulus Warsito (Yogyakarta: FISIPOL UMY, 1995). Hal.373

<sup>7</sup> William D. Coplin. Introduction to International Politics Theoretical Overview, terjemahan oleh Mercedws Marburn. Bandung: CV.Sinar Baru Offset. 1992. hal.30



## 1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Pengambil keputusan memerlukan dukungan dari policy influencers. Baik di negara demokratis maupun autokratis, para pemimpinnya banyak tergantung pada kemauan anggota masyarakatnya untuk memberi dukungan. Apakah dukungan angkatan bersenjata, dukungan finansial pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilu, dan sebagainya. Di lain pihak policy influencers membutuhkan pengambil keputusan. Kebutuhan itu mungkin untuk memperlancar jalan dalam hal ini politik dalam negeri atau untuk mendapatkan “penghormatan dari negara lain” dalam hal politik luar negeri.

Ada beberapa policy influencers yang memiliki peran penting dalam perumusan politik luar negeri:<sup>8</sup>

### *1. Birokrat*

Kelompok ini sangat berpengaruh karena fungsinya untuk menyalurkan informasi-informasi kepada para pembuat kebijakan dan kemudian melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan itu. Cara-cara yang dilakukan untuk mempengaruhi adalah 1) menentang keputusan dengan cara-cara rahasia atau ketentuan-ketentuan administratif, 2) menyensor informasi-informasi untuk para pembuat keputusan, 3) membocorkan informasi ke pers, 4) menerapkan keputusan yang berlainan dengan apa yang diputuskan oleh para pembuat kebijakan.

### *2. Partai Politik*

---

<sup>8</sup> Hand-out Teori Hubungan Internasional. Sugito, S.IP

Peran partai politik relatif kecil dalam mempengaruhi politik luar negeri. Hal ini disebabkan oleh perhatian partai yang lebih cenderung ke permasalahan-permasalahan domestik dan kompleksitas isu politik luar negeri yang menuntut keahlian tertentu yang tidak bisa didapat oleh para legislator yang sibuk.

### 3. *Kelompok Kepentingan*

### 4. *Massa*

Adanya pengangkatan Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri pada tahun 1998, memberikan perubahan baru bagi Cina. Hal ini disebabkan karena Zhu adalah seorang tokoh reformis yang menginginkan Cina bisa terus melakukan reformasi baik dari segi politik maupun ekonomi. Menurut Zhu dengan masuknya Cina menjadi anggota WTO akan dapat menentukan masa depan Cina untuk menjadi sebuah Negara yang perekonomiannya lebih maju serta menentukan kondisi masa depan pemerintah Cina agar lebih transparan.

Akibat dari masih banyaknya standar ganda yang dilakukan oleh birokrasi pada berbagai sector di Cina, hukum masih jauh ketinggalan dalam penerapannya sehingga apabila Cina masuk WTO dapat menjadi sebuah legitimasi untuk menunjukkan komitmennya dari para tokoh reformis Cina untuk dapat mempengaruhi kebijakan prioritas pembangunan domestic sekaligus untuk mendukung keputusan reformasi tersebut. Hal ini diakibatkan karena Cina merupakan sebuah Negara komunis yang orang-orang dalam birokrasi maupun perpolitikan Cina terdiri dari tokoh konservatif dan reformasi.

## 2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Adanya kemampuan ekonomi Cina yang kurang menentu menyebabkan Pemerintah Cina melakukan Reformasi ekonomi tahun 1997.<sup>9</sup> Dimana Jiang Zemin yang merupakan Presiden Cina menerapkan swastanisasi bagi Tiga Ratus Ribuan lebih BUMN Cina akibat dari banyaknya pengeluaran negara untuk BUMN tersebut yang menghabiskan 80% kredit Bank, sedangkan pemasukan BUMN tersebut 40% dari output Industri Cina. Pengeluaran negara yang besar ini dilakukan agar BUM tersebut bisa bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih kecil dan gesit.

Swastanisasi ini menimbulkan banyaknya jumlah pengangguran akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja menurut data dari Chinese Academy of Science Beijing, pengangguran tersebut telah mencapai 15 sampai 16 juta penduduk di perkotaan ditambah lagi dengan adanya 40 juta pertahun yang datang ke kota mencari pekerjaan.<sup>10</sup>

Pengangguran dan hutang yang ditanggung pemerintah menyebabkan Cina membutuhkan industri asing bagi pemasukan dalam negerinya. Sehingga dipilihnya WTO sebagai solusi yang tepat untuk membuka pasar Cina sehingga bisa membantu perekonomian di Cina.

## 3. Konteks International

Sejak tahun 1990-an konteks internasional yang bernaung dalam dua kekuatan negara besar akhirnya berubah, adanya kerutuhan Unisoviet sebagai

---

<sup>9</sup> *Kompas*, 4 September 1999

<sup>10</sup> Kevin Platt "China's Big Trade: Loss of Control" dalam *Christian Science Monitor* 14 April 1999. Hal.6

poros utama yang berhadapan dengan AS meninggalkan perang ideologi tersebut berakhir. Kondisi AS yang tidak menentu dalam perekonomiannya menimbulkan AS sebagai negara superpower lebih mengorientasikan kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi yang lebih bersifat global, sehingga negara-negara dalam melaksanakan kerja sama politik dan ekonomi luar negerinya, dewasa ini lebih condong ada hubungan yang berbentuk multilateral, seperti lembaga atau badan-badan internasional, contohnya adalah PBB, WTO, MEE, dan lain-lain.

## **2. Model Aktor Rasional**

Politik Luar Negeri di buat oleh pemerintah negara (sebagai aktor tunggal) dengan tujuan memaksimalkan pencapaian tujuan dengan kekuatan yang ada. Dengan demikian, proses pembuatan kebijakan bersifat ilmiah.

Pilihan kebijakan ideal biasanya dilakukan melalui proses rasional dengan mempertimbangkan setiap aspek keputusan yang paling baik. Para analis dari kelompok ini menekankan pentingnya menghasilkan keputusan yang rasional, dimana tujuan diepakati sebelumnya, kemudian berbagai sarana dicari untuk memaksimalkan pencapaian tujuan tersebut. Proses ini mengharuskan pembuat keputusan untuk pertama kali menentukan tujuan kemudian mempertimbangkan semua alternative yang ada untuk tujuan dari keputusan itu. Kebijakan atau keputusan yang baik muncul dari berbagai alternative yang dipandang paling ideal untuk mencapai tujuan tadi.<sup>11</sup>

---

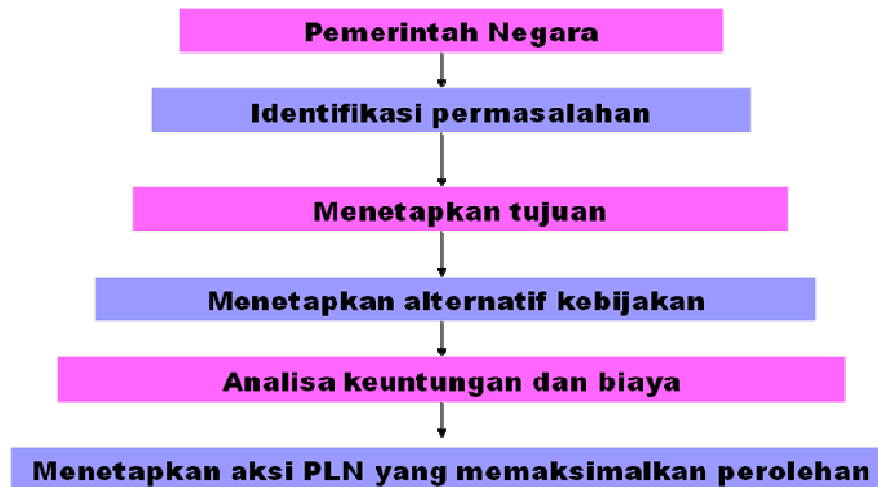
<sup>11</sup> Skripsi Dewi Rosalina, Upaya Liberalisasi Cina ( Studi kasus : Kebijakan RRC Untuk Menjadi Anggota WTO), Yogyakarta: HI Fisipol UMY, 2000. Hal 13.

Dalam mencoba menelusuri bagaimana para pembuat keputusan menentukan pilihan kebijakan, maka penulis mencoba menggunakan model aktor rasional sebagai alat analisisnya. Model ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas dari perilaku ideal, artinya mencari pilihan alternative yang paling ideal. Dengan kata lain, dengan memutuskan suatu kebijaksanaan dengan mencari pilihan kebijaksanaan yang optimal dalam artian pada hubungan tujuan dan sarannya.

Menurut teoritisi hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu politik luar negeri suatu Negara, Graham T. Allison berpendapat bahwa model aktor rasional merupakan model yang memandang politik luar negeri sebagai hasil dari tindakan aktor rasional yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan ini digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dengan demikian para analis politik dalam hal ini pemimpin Cina harus mampu memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative-alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil dan diperhitungkan untung rugi atas masing-masing alternative itu.

### Proses Pembuatan Kebijakan Rasional.

Gambar. 1.2. Proses pembuatan kebijakan rasional.<sup>12</sup>



Para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternative-alternatif itu menggunakan criteria “optimalisasi hasil”, yaitu setelah semua alternative yang ada dikaji dan hasil dari nilai serta kemungkinan yang diperkirakan sudah diperoleh, para pembuat keputusan bisa membuat pilihan optimal mereka. Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksananya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bias melakukan penelelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijaksanaan yang

---

<sup>12</sup> Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta : LP3ES. 1990. Hal, 234.

mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bias dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>13</sup>

Menurut Allison, aktor rasional dianggap mewakili sebuah usaha untuk menghubungkan tindakan dengan perhitungan yang masuk akal. Selanjutnya aktor rasional dari pembuatan keputusan adalah aktor yang mampu menjelaskan secara rinci tujuan mereka, pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi yang mungkin timbul dari tiap pilihan alternative sebelum membuat keputusan.

Pendekatan ini sering digunakan oleh sejarawan diplomatik untuk melukiskan interaksi politik luar negeri berbagai negara atau tindakan para pemimpin negara-negara itu dalam merespon negara lainnya. Negara dan pengambil keputusan dipandang sebagai aktor terpencil yang memaksimalkan tujuannya dalam politik global. Pendekatan ini memiliki kelemahan adalah asumsi kalkulasi rasional yang dilakukan para pengambil kebijakan dalam situasi ideal yang jarang terjadi. Dengan kata lain apa yang disebut rasional oleh peneliti sering dianggap rasional oleh yang lainnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangat relevan bila Cina dalam hal ini menggunakan actor rasional sebagai acuan untuk menentukan keputusan apa yang akan dibuat. Cina melihat bahwa alternative-alternatif dalam usaha untuk menjadi anggota WTO mendatangkan keuntungan maupun kerugian yang sedikit banyak akan mempengaruhi negaranya. Masalah keanggotaan Cina sejak tahun 1986, saat itu Cina mengajukan permohonan resminya kepada WTO tetapi

---

<sup>13</sup> *ibid*

permohonan tersebut akhirnya ditolak. Pada 1999 Cina kembali secara formal mengajukan diri untuk menjadi anggota WTO. Pada tahapan ini dimulai suatu proses oleh Perdana Menteri Cina sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan suatu perundingan dengan WTO. Keputusan yang diambil tersebut disebabkan oleh adanya perhatian pada kepentingan dan tujuan serta alternative yang muncul.

Para pembuat keputusan mengambil keputusan didasarkan pada kepentingan pembangunan nasionalnya, yaitu mengoptimalkan pembangunan domestic dan pembangunan luar negerinya. Dari kepentingan tersebut, maka muncul alternative-alternatif bagi Cina antara lain dengan masuknya Cina diharapkan dapat memperkuat perekonomiannya dan Negara-negara lainnya karena akan dapat menciptakan pasar baru bagi ekspor-impor Cina serta perdagangan antara Negara anggota WTO. Selain itu, Cina sebagai Negara sosialis kurang diakui perannya dalam konteks internasional karena dominannya peran Negara maju yang menganut liberalism akan lebih berperan aktif di dunia internasional sehingga Cina semakin mampu berintegrasi di dalamnya. Keadaan seperti ini akan membuat Cina lebih diperhitingkan oleh masyarakat internasional yang mendatangkan keuntungan bagi Cina.

Alternative-alternatif tersebut menjadikan Negara tirai bambu ini ingin masuk dan bergabung kedalam WTO. Keinginan itu didasarkan pada pandangan Cina tentang keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh Negara anggota WTO. Keuntungan-keuntungan yang ada pada dasarnya diperoleh dari peraturan-peraturan dan kemudaha-kemudahan antara sesama anggota. Alternative-alternatif yang terbangun di Cina ini telah mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Cina



dengan lingkungan yang belum teratur itu bersedia menerima syarat-syarat yang diberlakukan oleh WTO.

*World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) adalah aktor yang digunakan penulis dalam konsep organisasi internasional tersebut. Dalam situs resminya, *World Trade Organization is an organization for liberalizing trade. It's a forum for governments to negotiate trade agreements. It's a place for them to settle trade disputes. It operates a sistem of trade rules.*<sup>14</sup> **Organisasi Perdagangan Dunia** (bahasa Inggris: **WTO**, *World Trade Organization*) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya (WTO, 2004a).<sup>15</sup>

WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Selain itu, tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan.

Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu :<sup>16</sup>

a. Implementasi dari Persetujuan WTO

---

<sup>14</sup> [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact1\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm)

<sup>15</sup> [http://id.wikiquote.org/wiki/Organisasi\\_Perdagangan\\_Dunia](http://id.wikiquote.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia)

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, hal 115 dikutip dalam Aprilia Gayatri, *WTO dan Pengaruhnya Bagi Indonesia*. Hal.5

Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian – perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.

b. Forum untuk perundingan perdagangan

Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu – isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO.

c. Penyelesaian sengketa

Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO

d. Mengawasi kebijakan perdagangan

Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism – TPRM)

e. Kerjasama dengan organisasi lainnya

Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi\_organisasi non-pemerintah.

Adapun 10 keuntungan dari sistem perdagangan WTO, antara lain :<sup>17</sup>

1. *Peace*, mendorong terciptanya perdamaian.
2. *Disputes*, menangani perselisihan secara konstruktif.
3. *Rules*, peraturan-peraturan yang sesuai dengan sistem multilateral akan memudahkan perdagangan antar Negara.

---

<sup>17</sup> [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/10ben\\_e/10b00\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b00_e.htm). diakses tanggal 10 Mei 2009.

4. *Cost of living*, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif sehingga biaya hidup menjadi lebih murah.
5. *Choice*, memberikan banyak pilihan atas produk dengan kualitas berbeda kepada konsumen.
6. *Incomes*, dapat meningkatkan pendapatan.
7. *Growth and jobs*, mendorong pertumbuhan ekonomi.
8. *Efficiency*, prinsip dasar WTO menjadikan sistem ekonomi lebih efisien.
9. *Lobbying*, melindungi pemerintah Negara anggota dari penyimpangan kepentingan.
10. *Good government*, mendorong terciptanya pemerintah yang bersih.

Besar kecilnya pengaruh dari masing-masing faktor tertentu berlainan, tergantung pada Negara yang dianalisis. Dalam hal ini, ketiga faktor sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina dalam menerima penerapan standar lingkungan yang diterapkan oleh WTO sebagai salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh calon Negara anggota.

#### **E. Hipotesa**

Dari pembahasan di atas penulis dapat menarik hipotesa bahwa Cina menerima penerapan standar lingkungan kedalam kebijakannya sebagai syarat keanggotaan WTO karena menjadi anggota WTO akan memberikan banyak keuntungan yang dapat mempermudah perdagangan antar Negara untuk meningkatkan pertumbuhannya ekonominya sekaligus dapat memperbaiki lingkungannya yang buruk.

## **F. Jangkauan Penulisan**

Untuk menjelaskan tentang kepentingan Cina dalam keanggotaan WTO yang kaitannya dengan ketersediaan Cina dalam penetapan standar lingkungan dalam kebijakan ekonominya sebagai syarat sebagai anggota WTO, penulis memberikan batasan waktu yaitu sebelum masuknya Cina kedalam anggota WTO mulai dari tahun 1995 sampai setelah menjadi anggota WTO yaitu tahun 2005 dimana dalam kurun waktu tersebut Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder melalui studi literature atau studi pustaka. Studi pustaka ini berupa buku-buku literature, media cetak, media elektronik (internet), jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba membagi karya tulis ini kedalam lima bab secara sistematis dari bab I sampai dengan bab V sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan Pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Menggambarkan tentang masalah krisis lingkungan di Cina akibat dari reformasi ekonominya.

- BAB III Menjelaskan tentang kondisi perekonomian dan perindustrian Cina sebelum menjadi anggota WTO.
- BAB IV Menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Cina dalam penerimaan standar lingkungan sebagai salah satu syarat menjadi anggota WTO.
- BAB IV Kesimpulan